

# **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang**

**Alfi Syahrin**

## ***Abstrak***

*Alfi Syahrin. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, di bawah bimbingan Drs. M. Z. Arifin, M.Si selaku pembimbing I dan Dini Zulfiani, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang serta faktor kendala atau penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat diantaranya faktor Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari Pengumpulan Data (Data Collection), Kondensasi Data (Data Condensation), Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing).*

*Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berpengaruh pada faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang antara lain dari Kurang akurat data yang diperoleh, Gangguan Jaringan/Koneksi, serta Minimnya peralatan yang mendukung pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).*

**Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)***

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang Masalah***

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasional dapat dilihat dari pada program-program pemerintah yang telah dibangun, dan telah menjadi komitmen dari awal bahwa pembangunan diarahkan untuk membangun Negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika program-program

pemerintah tersebut mencapai keberhasilannya, maka diperlukan potensi manusia atau masyarakat yang memiliki kesadaran akan peran sertanya dalam mendukung pembangunan-pembangunan yang ada karena program-program pemerintah itupun dibuat dan diperuntukkan untuk masyarakat luas bukan hanya untuk pemerintah itu sendiri.

Perbedaan dalam hal kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan antar wilayah pun berbeda-beda, salah satunya yang dipandang dominan adalah kesadaran akan sikap dan peran serta masyarakat dalam program pemerintah, apakah sikap mereka mendukung ataupun menolak terjadinya program pemerintah tersebut. Dengan tingginya dukungan akan program-program pemerintah yang ada, maka akan semakin tinggi pula tingkat suatu perubahan dalam wilayah tersebut.

Program pemerintah yang diangkat disini ialah dalam bidang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan proses pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk atau masyarakat dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Pada saat ini pemerintah menetapkan kebijakan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahannya yang sebelumnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Salah satu program pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan yang memerlukan peran serta masyarakat didalamnya adalah program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dalam Pasal 64 ayat 7 juga dinyatakan bahwa masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari semula 5 Tahun menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. Kartu Tanda penduduk Elektronik (e-KTP) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database

kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Keberhasilan pembangunan ataupun kebijakan program pemerintah inipun tidak akan terjadi apabila masyarakat yang merupakan sasaran pokok dari pembangunan itu, tidak menyadari dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang mendiami suatu wilayah tertentu. Karena sebagaimana yang ditekankan di sini adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP yang mana kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai bukti diri dari setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Maka perlu dicarikan solusi tertentu agar seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memilikinya, khususnya warga masyarakat yang berada di wilayah Kota Bontang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya pemerintah daerah telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunannya sendiri. Dapat dilihat disini bahwa pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan sistem pelayanan satu pintu tetapi pada proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang melimpahkan wewenangnya kepada setiap kecamatan yang ada di Kota Bontang sesuai dengan domisili/tempat tinggal masyarakat itu berada.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, pelimpahan wewenang dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya pegawai atau petugas operator dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka dari itu proses perekaman e-KTP dilimpahkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bontang kepada setiap kecamatan yang ada di Kota Bontang. Dan yang dimaksud dengan sistem pelayanan satu pintu disini adalah semua data perekaman di setiap kecamatan langsung tersimpan ke dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang selanjutnya akan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

Pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Adapun data yang penulis dapatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ialah jumlah penduduk Kota Bontang sebanyak 167.094 berdasarkan data agrerat Kependudukan Semester I Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah terdapatnya 119.026 penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan hanya 112.192 penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP, sehingga masih ada 6.834 penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa permasalahan, diantaranya yakni :

- 1) Banyak masyarakat yang menjalani pendidikan seperti kuliah dan sekolah di luar Kota Bontang.
- 2) Banyaknya masyarakat pendatang baru yang masih menggunakan KTP lama.
- 3) Berdasarkan tingkat usia kisaran 55 tahun hingga >75 tahun, untuk penduduk Kota Bontang terdapat sebanyak 14.119 penduduk ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP dikarenakan rentannya usia tersebut.
- 4) Dan berdasarkan pada jenis kelamin, disini bisa dilihat bahwa mayoritas kaum penduduk laki-laki ialah dengan bekerja dan dalam waktu pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang bertabrakan dengan jam kerja yang berlaku, sehingga berdasarkan jenis kelamin laki-laki inilah yang juga dapat menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP.

Jadi berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

### ***Rumusan Masalah***

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

### ***Manfaat Penelitian***

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis:
  - a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus.
  - b) Menambah wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.
2. Segi Praktis :
  - a) Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP.
  - b) Sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Partisipasi Masyarakat***

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai akibat dari pengaruh stakeholder menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan dan penggunaan yang bermanfaat bagi mereka. Ini artinya dalam menjalankan suatu kegiatan atau program, sasaran atau masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, mendapatkan manfaat dan penghargaan dari hasil

kegiatan atau program tersebut, serta bemitra dengan pihak terkait (Angsari dalam Anwas, 2013:93).

### ***Macam-Macam Partisipasi***

Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

#### 1) Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

#### 2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

### ***Pentingnya Partisipasi Masyarakat***

Menurut (Diana Conyers dalam Kusuma, 2013:70) terdapat 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting didalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program pemerintah, yaitu :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya maka suatu kegiatan atau program kemungkinan besar akan gagal.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk kegiatan atau program tersebut.
- 3) Yang mendorong adanya partisipasi umum karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan di dalam suatu program atau proyek masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dalam daerah mereka sendiri.

### ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat***

Faktor yang disampaikan oleh Angell yang dikutip oleh Saca Firmansyah (2009:11-12) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia, faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih cenderung lebih banyak berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin, nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
3. Pendidikan, dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi dan pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Pekerjaan dan Penghasilan, hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomiannya.

### ***Administrasi Kependudukan***

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

### ***Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)***

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi Konsepsional atau definisi konsep adalah merupakan pembatasan pengertian tentang sesuatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang dilakukan yaitu “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan e-KTP” adalah keikutsertaan masyarakat untuk berkontribusi dalam keberhasilan program pemerintah yakni

pembuatan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan bertanggung jawab dalam pembuatan e-KTP yang menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bontang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Menurut Sugiyono (2013:1) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan konsep penelitian yakni “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan e-KTP” maka fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :
  - a) Usia
  - b) Jenis Kelamin
  - c) Pendidikan
  - d) Pekerjaan dan Penghasilan
- 2) Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2013:62) sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer :
  - a. *Key Informan* adalah Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
  - b. *Informan* adalah Staf Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, penduduk yang sudah membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan penduduk yang belum membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
2. Data Sekunder :
  - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan
  - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
  - a. Observasi



- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Aktivitas dalam analisis data yaitu Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Kota Bontang***

Kota Bontang dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur.

### ***Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang***

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang terbentuk bersamaan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kota Bontang yang terletak dijalan Awang Long No.1 Kota Bontang yang sebelumnya masih menyewa di Jl.Pattimura No.5.

### ***Hasil Penelitian***

Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan fokus yang berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu : Faktor Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan.

### ***Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Kota Bontang***

#### ***Usia***

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis menganalisa bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sudah cukup baik akan tetapi baik masyarakat usia produktif maupun non produktif kurang berpartisipasi dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan dari beberapa individu hanya melakukan sesuatu itu hanya karena keperluannya yang mendesak, terlihat

dari jumlah penduduk yang Wajib Memiliki e-KTP dan Sudah Perekaman e-KTP sebanyak 112.192 jiwa atau 67,15 %, dan masih sebanyak 6.834 jiwa atau 4,08 % Jumlah Penduduk Kota Bontang yang Wajib Memiliki e-KTP dan Belum Perekaman e-KTP.

### ***Jenis Kelamin***

Dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, maka dapat dilihat bahwa faktor jenis kelamin dalam membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih berfaktor pada jenis kelamin atau perbedaan gender laki-laki dan perempuan, yang sebagian besar laki-laki terhalang karena kesibukan pekerjaan sedangkan perempuan tidak.

### ***Pendidikan***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat akan tetapi dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP tersebut walaupun pendidikan tersebut tinggi maupun rendah.

### ***Pekerjaan dan Penghasilan***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa faktor pekerjaan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang baik pekerjaan itu menuntut atau tidak dalam kepemilikan e-KTP tersebut.

### ***Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang***

#### **1. Kurang akurat data yang diperoleh**

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bahwasanya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih menemukan kendala di lapangan seperti kurangnya informasi atas masyarakat yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai masyarakat yang belum melakukan perekaman dalam pembuatan e-KTP sehingga pada saat pihak Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan sistem jemput bola atau perekaman *mobile system*, barulah diketahui bahwa informasi/data yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak Disdukcapil belumlah tercatat, sehingga dari kejadian tersebut pihak Disdukcapil harus bekerja ulang untuk mendapatkan data yang sesuai. Dan ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat atas

informasi/data yang terbaru serta akurat sangatlah dibutuhkan agar tidak menghambat pihak Disdukcapil dalam keberhasilan pembuatan e-KTP.

## 2. Gangguan Jaringan/Koneksi

Dari wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), kinerja pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang terhambat dengan adanya gangguan jaringan/koneksi yang mengakibatkan tidak bekerjanya sistem yang menghubungkan data di Disdukcapil Kota Bontang kepada pusat data di Kementerian Dalam Negeri. Dan ini mengakibatkan lambatnya pengumpulan data baik data perekaman di Kecamatan yang berada di Kota Bontang maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang itu sendiri, atas data terbaru dalam pembuatan e-KTP yang akan dikirim kepada pusat karena semua data pada hari itu yang tercatat harus dikirim kepada pusat sebagai data yang berlaku secara nasional agar tidak timbulnya masalah KTP ganda di kemudian hari.

## 3. Minimnya peralatan yang mendukung pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)

Minimnya peralatan yang mendukung pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ini dimaksudkan kepada habisnya blanko untuk pembuatan dasar dari e-KTP, terhambatnya masyarakat yang ingin memiliki e-KTP dikarenakan habisnya blanko tersebut juga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluh akan jarak tempuh bagi tempat tinggal mereka yang jauh tetapi tidak mendapatkan e-KTP itu pada saat kembali, yang tidak lain hanya dikarenakan blanko/peralatan pembuatan e-KTP tersebut yang belum tersedia dari pusat.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berpengaruh pada faktor usia yang dalam hal ini berbagai jenis usia baik produktif maupun non produktif dalam menyadari dalam berbagai manfaat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), jenis kelamin yang dalam perbedaan gender atas kegiatan sehari-hari yang berbeda, pendidikan yang baik pendidikan itu tinggi maupun

rendah dalam memandang kelebihan akan dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), pekerjaan dan penghasilan yang dalam hal ini pekerjaan yang baik itu menuntut atau tidak dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang antara lain adalah :

1. kurang akuratnya data yang diperoleh
2. Gangguan Jaringan/Koneksi
3. Minimnya peralatan yang mendukung pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)

### ***Saran***

1. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media online, memasang spanduk/pamphlet di berbagai tempat agar masyarakat dapat mengetahui program perekaman dan pencetakan di luar domisili sehingga masyarakat yang sedang berada di luar daerah tidak perlu lagi kembali ke daerah asalnya untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
2. Disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat bekerjasama dengan ketua RT setempat dan masyarakat dalam mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada hari yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
3. Dilihat dari permasalahan yang ada bahwa beberapa masyarakat tidak dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dikarenakan tidak mendapatkan izin keluar dari Perusahaan atau Instansi tempat ia bekerja maka sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat bekerjasama dengan setiap Perusahaan yang ada di Kota Bontang dan setiap Instansi seperti Rumah Sakit, Kantor Polisi, Universitas, Sekolah dan sebagainya agar masyarakat dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebaiknya dapat memperkuat ataupun menambah jaringan internet yang memiliki keunggulan dibandingkan sistem jaringan yang sebelumnya sehingga tidak terjadi lagi gangguan koneksi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
5. Sebaiknya bagi masyarakat agar selalu melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian dan pindah tempat tinggal yang dapat membantu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mendapatkan data yang akurat saat terjun ke lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku :***

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Agus, Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta. UM-Press.
- Hartomo, H. 1999. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini, Usman dan Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Irene A.D. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soenarko. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soetrisno. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Karnisius.
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates,*. Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

### **Dokumen-dokumen :**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

**Internet :**

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id>

<http://satulayanan.id/layanan/index/17/e-ktp/kemendagri>

<http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html>